

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

BAB 2 merupakan tinjauan konseptual yang memuat tentang penelitian terdahulu, tinjauan konseptual terdahulu dan tinjauan konseptual yang relevan.

2.1 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang bersumber dari penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat penting karena dapat membantu dalam penelitian masalah yang akan dilakukan oleh peneliti. Dasar itu berupa penelitian terdahulu berupa skripsi yang pembahasannya atau topiknya hampir sama dengan topik yang peneliti ambil yaitu mengenai peran pendamping sosial PKH. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti dituangkan ke dalam tabel sebagai berikut:

1. Moh. Fathur Rohman (2017) “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Triwidadi Pajangan Bantul”. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian tersebut penulis meneliti tentang bagaimana peran-peran yang dilakukan oleh para pendamping program keluarga harapan (PKH) dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Triwidadi, bagaimana hasil yang dicapai dan faktor-faktor penghambat apa yang ada dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut. Kerangka teori yang digunakan adalah konsep pemberdayaan menurut Edi Suharto dan peran *community worker* menurut Jim Ife. Hasil dari penelitian tersebut adalah peran pendamping sebagian besar dikategorikan ke dalam 4 kelompok yaitu peran edukatif, peran fasilitatif, peran teknis, serta peran representatif. Menurut kesimpulan penulis,

peran pendamping sosial yang dominan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Triwidadi adalah peran fasilitatif, dengan tujuan proses perubahan tingkah laku masyarakat menuju masyarakat yang lebih modern dan berdaya

2. Ayu Kiswati (2019) “Peran pendamping program keluarga harapan (PKH) dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui kegiatan rutin pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) di Kelurahan Blotongan Sidorejo, Salatiga”. Menurut penulis kesimpulan dalam penelitian tersebut bahwa peran pendamping program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga menitikberatkan pada upaya pendamping dalam mengubah perilaku (kebiasaan) ataupun pola pikir yang kurang tepat terutama tentang pendidikan dan kesehatan. Teori yang digunakan adalah teori kesejahteraan sosial oleh Edi Suharto dengan mempelajari suatu keadaan/fenomena yang terjadi di masyarakat.
3. Andi Reinreng Baso Ilham (2021) “Peran Pendamping Sosial Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendamping sosial PKH yang ada di Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar adalah peran verifikasi dan peran teknis yang membantu masyarakat dalam proses pencairan dana bantuan sosial PKH. Penelitian yang dilakukan lebih banyak menggunakan kerangka teori Edi Suharto dan menitikberatkan pada proses administrasi penyaluran bantuan PKH.

4. Rafikah Atikah (2021). “Jaringan Sosial Antar Pendamping PKH Dalam Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah.” Pendekatan dalam penelitian menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial menyeluruh yang dilakukan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mayoritas masih berkuat kepada koordinator PKH Kabupaten Sukamara. Pendamping PKH belum memaksimalkan jaringan sosial menyeluruh kepada pihak-pihak yang lain agar dapat lebih menguntungkan pendamping dalam memantau komponen PKH dan mengukur keberhasilan pelaksanaan Pertemuan Pelaksanaan Kemampuan Keluarga (P2K2). Penelitian yang dilakukan lebih banyak menggunakan kerangka teori Barnes dan menitikberatkan pada jaringan sosial pendamping dalam pelaksanaan P2K2 bantuan PKH.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran pendamping program keluarga harapan (PKH) dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui kegiatan rutin pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) di Kelurahan Blotongan Sidorejo, Salatiga.	Moh. Fathur Rohman (2017)	Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Konsep penelitian yang dilakukan yaitu tentang peran pendamping sosial PKH.	Fokus masalah penelitian oleh Ayu Kiswati terdapat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin pada kegiatan P2K2, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada bagaimana pendamping sosial berperan dalam proses kegiatan P2K2.

2.	Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Triwidadi Pajangan Bantul	Ayu Kiswati (2019)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan yaitu menggunakan purposive sampling. Konsep penelitian tentang peran pendamping sosial PKH.	Fokus masalah penelitian oleh Moh Fatur Rohman menitikberatkan pada bagaimana peran pendamping sosial PKH dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sedang penelitian ini berfokus pada peran pendamping sosial pada kegiatan P2K2.
3.	Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penyaluran Program PKH di Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar	Andi Reinreng Baso Ilham (2021)	Variabel Penelitian yaitu Program Keluarga Harapan Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif.	Fokus masalah penelitian oleh Andi Reinreng Baso Ilham berfokus pada peran pendamping sosial dalam penyaluran program PKH. Sub permasalahan pada penelitian mereka juga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.
4.	Jaringan Sosial Antar Pendamping PKH Dalam Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah	Rafikah Atikah (2021).	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Konsep penelitian tentang peran pendamping sosial PKH.	Fokus permasalahan yang dilakukan dalam penelitian oleh Rafikah atikah berfokus pada bagaimana jaringan sosial antar pendamping sosial PKH dalam pelaksanaan P2K2 sedangkan pada penelitian ini berfokus pada peran Pendamping sosial dalam pelaksanaan P2K2

Sumber : Studi Literatur Penulis 2024

Peneliti mempelajari dan memahami lebih jelas tentang bagaimana peran seorang pendamping sosial program PKH di beberapa aspek yang berbeda-beda. Sehingga dapat diketahui perbedaan apa saja yang muncul di setiap wilayah. Persamaan dari beberapa penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas mengenai bagaimana jenis peran seorang pendamping PKH.

Perbedaannya terletak pada fokus pelaksanaan pendamping PKH di tempat yang berbeda, peneliti menggunakan metode penelitian yang berbeda yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan cakupan responden yang lebih luas dan mengambil fokus masalah dibidang peran pendamping sosial dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

2. 2 Tinjauan Konseptual Yang Relevan

2.2.1 Tinjauan Tentang Teori Peran

1. Pengertian Peran

Pengertian peran memiliki peran penting dalam memahami interaksi sosial dan dinamika dalam berbagai konteks kehidupan. Peran didalamnya mencakup pola perilaku dan ekspektasi dalam masyarakat, dan bagaimana membentuk identitas individu dan membantu mengatur hubungan antara individu dengan lingkungannya. Berikut pengertian peran menurut Barker (1999:417). Barker (1999: 417) menyatakan bahwa “ Peran: (1) Pola perilaku yang ditentukan secara budaya yang ditentukan untuk individu yang menempati status tertentu. (2) Norma sosial yang melekat pada posisi sosial tertentu yang menentukan tindakan timbal balik.”

Berdasarkan pendapat Barker tersebut, peran mengatur bagaimana seseorang harus berperilaku atau bertindak dalam posisi sosial atau status tertentu. Peran juga mencerminkan norma sosial yang melekat pada posisi sosial tertentu yang menentukan bagaimana individu dalam posisi tersebut harus berinteraksi dengan orang lain atau lingkungannya. dalam konteks pekerja sosial, peran berarti seorang pekerja sosial diharapkan untuk mengikuti pola perilaku tertentu dan mematuhi norma-norma yang berlaku dalam profesi mereka. Mereka diharapkan untuk bertindak dengan cara yang umumnya dianggap tepat dan sesuai dengan tanggung jawab profesi pekerja sosial, baik oleh klien yang dilayani, atasan atau penyelia, kolega, dan masyarakat umum.

Misalnya, seseorang yang menempati status "pekerja sosial" diharapkan oleh orang lain- yaitu, klien, penyelia, profesi, masyarakat umum, dan sebagainya untuk berperilaku dengan cara yang umumnya ditentukan untuk semua pekerja sosial. Peran memiliki komponen-komponen yang saling terkait dan mempengaruhi cara individu bertindak dan berperilaku. Dalam konteks pekerja sosial, peran terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab profesional dengan tepat. Hal ini dinyatakan oleh pendapat ahli dibawah ini.

Goldstein dalam Dubois dan Miley (2005:227) mengemukakan:

Peran pekerja sosial adalah pola perilaku profesional yang diharapkan. Peran menetapkan perilaku tertentu dan menentukan tanggapan yang sesuai untuk situasi tertentu. Tiga komponen yang saling terkait membentuk setiap peran: konsep peran, atau bagaimana orang percaya mereka harus bertindak dalam situasi tertentu; harapan peran, atau bagaimana orang lain percaya orang harus bertindak ketika mereka menempati status tertentu; dan kinerja peran, atau bagaimana orang benar- benar bertindak.

Ketiga komponen peran menurut pendapat ahli diatas saling terkait dan membentuk peran pekerja sosial secara keseluruhan. Konsep peran menjadi dasar dari bagaimana seorang pekerja sosial mengartikan peran mereka dan memandu tindakan mereka, sedangkan harapan peran mencerminkan bagaimana peran mereka dilihat oleh orang lain. Kinerja peran adalah implementasi konkret dari peran tersebut dalam tindakan nyata sehari-hari. Dengan memahami hal tersebut, seorang pekerja sosial dapat mengintegrasikan identitas profesional mereka dengan tugas dan tanggung jawab yang dihadapi dalam pekerjaan sosial. Hal ini juga membantu pekerja sosial untuk lebih efektif dan responsif dalam interaksi dengan klien dan lingkungan kerja mereka.

2. Peran Pendamping Sosial

Menurut Jim Ife (2008) terdapat empat peran utama yang harus dilakukan oleh seorang pendamping sebagai pemberdayaan masyarakat, peran tersebut yaitu:

1) Peran Fasilitatif (*Fasilitative Roles*)

Peran Fasilitatif didedikasikan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui, menghargai kontribusi dan karya individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Dalam rangka pengembangan potensi individu, kelompok dan masyarakat mencapai kesepakatan kerjasama dengan pihak lain. Fasilitator juga bertugas untuk menambah daya pikir dan pola pikir masyarakat yang masih tertinggal ke arah yang lebih modern. Hal ini tentu dibutuhkan program-program yang akomodatif, transformatif, dan emansipatoris.

2) Peran Edukasi (*Educational Roles*)

Peran edukasi yaitu peran dan keterampilan dari seseorang dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan atau dapat dikatakan sebagai sebuah peran yang bersifat mendidik. Pendamping Sosial berperan dalam menetapkan agenda, tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi individu dan kelompok masyarakat. Peran edukasi ini dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran, memberikan informasi, melatih individu, kelompok dan masyarakat untuk berprestasi.

3) Peran Teknis (*Technical Roles*)

Peran teknis merupakan peran yang mengenai teknik atau keterampilan. Mengacu pada kemampuan Pendamping Sosial dalam mengumpulkan dan menganalisis data, menggunakan komputer, presentasi baik lisan maupun tulisan, manajemen dan pengendalian keuangan, serta melakukan penilaian kebutuhan untuk pengembangan potensi individu, kelompok dan masyarakat. Peran tersebut dapat dilakukan Pendamping Sosial untuk memperoleh informasi dan data bersama-sama dengan individu, kelompok dan masyarakat, informasi dan data tersebut dapat digunakan untuk menarik perhatian para pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan berkontribusi untuk promosi. Oleh karena itu, pelayanan sosial memegang peranan yang sangat

penting dalam mengembangkan potensi individu, kelompok dan masyarakat.

4) Peran Representasi (*Representational Roles*)

Peran representasi yaitu peran yang digunakan untuk menunjukkan berbagai peran seseorang pekerja masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini Pendamping Sosial melakukan peran dimana berinteraksi dengan lembaga lembaga di masyarakat untuk kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat. Adapun cara yang perlu dilakukan yaitu memperoleh sumber daya dari luar dengan keseimbangan yang cermat, seperti bantuan modal komersial dan pelatihan pengembangan potensial. Advokasi untuk membela kepentingan individu, kelompok dan masyarakat. Menggunakan media massa untuk memperkenalkan hasil produksi.

2.2.2 Tinjauan Tentang Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik merupakan kondisi dimana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi hak hak atau kebutuhan dasarnya sebagai upaya mengembangkan kehidupan mereka dari sisi ekonomi. Kebutuhan dasar yang dimaksud yaitu kebutuhan dasar makanan pokok dan kebutuhan dasar bukan makanan.

Menurut Kuncoro dalam Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2011) menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Dari definisi tersebut mengisyaratkan tiga

pernyataan dasar yakni (1) Bagaimana mengukur standar hidup? (2) Apa yang dimaksud dengan standar hidup minimum? (3) Seperti apa indikator yang mampu mewakili masalah kemiskinan yang begitu rumit?

Sedangkan menurut World Bank (2015), kemiskinan merupakan kondisi dimana individu tidak mampu menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti kesehatan, standar hidup yang layak, kebebasan, harga diri dan rasa untuk dihormati selayak, kebebasan, harga diri dan rasa untuk dihormati seperti individu lainnya. perti individu lainnya. Kemiskinan merupakan kekurangan pada sumber daya yang menyebabkan Kemiskinan merupakan kekurangan pada sumber daya yang menyebabkan ketidaklayakan kehidupan yang dimiliki oleh penyandang nya. ketidaklayakan kehidupan yang dimiliki oleh penyandang nya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana individu, kelompok atau masyarakat tidak memiliki daya dan upaya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat umum. Sehingga kemiskinan menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang saat ini dan sedang dilakukan penanggulangannya agar tidak semakin bertambah penderitanya.

2. Bentuk Bentuk Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya sebuah fenomena, kemiskinan merupakan persoalan yang diakibatkan oleh kondisi ketidakberdayaan individu yang merupakan akibat dari rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan,

kerentanan dan kesenjangan sosial. Berikut merupakan bentuk kemiskinan yang dianggap sebagai kondisi yang multidimensional menurut Suryawati (2004) :

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan bentuk ini merupakan kemiskinan dimana pendapatan individu tersebut berada di bawah garis kemiskinan dan tidak mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan yang dimaksudkan adalah kebutuhan dalam sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Kemiskinan absolut merupakan dampak dari rendahnya kualitas individu itu sendiri.

2) Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi dimana individu tersebut masih mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih belum memenuhi standar kehidupan masyarakat pada umumnya. Bentuk kemiskinan ini akan berubah apabila terdapat kemauan dalam diri individu tersebut untuk berubah. Sehingga kemiskinan ini bersifat dinamis. Apabila angka ketimpangan tinggi, maka jumlah penduduk miskin juga akan semakin bertambah.

3) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sistem sumber. Menurut Kanjeng Pangeran Haryo Prof. Dr. Selo Soemardjan, kemiskinan struktural adalah kondisi

yang dialami oleh masyarakat yang diakibatkan oleh suatu struktur masyarakat yang tidak bisa ikut menggunakan sumber sumber pendapatan yang tersedia bagi mereka. Maka kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai kemiskinan yang terjadi karena masyarakat tidak memiliki akses dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia bagi mereka.

4) Kemiskinan Situasional

Kemiskinan bentuk ini merupakan kondisi dimana kemiskinan yang dialami oleh individu, kelompok dan masyarakat disebabkan oleh faktor faktor alamiah seperti daerah terpencil yang sulit akses mengakibatkan kemiskinan dialami oleh masyarakat yang bermukim di lingkungan tersebut.

5) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang berasal dari budaya dan adat istiadat secara turun temurun dan mereka tidak mau mengubah hidup mereka.

3. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi multidimensional yang disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait, berikut merupakan faktor penyebab kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Hudaya (2009) :

- 1) Pendidikan yang rendah, hal ini dapat terjadi karena individu tidak memiliki keterampilan tertentu yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup mereka sehingga memiliki keterbatasan dalam dunia kerja.

- 2) Terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu penyebab kemiskinan, karena seseorang harus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sedangkan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia semakin hari semakin berkurang, menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat bekerja karena tidak mampu bersaing dengan individu lain yang kompeten.
- 3) Laju pertumbuhan penduduk juga dapat menyebabkan kemiskinan dimana Laju pertumbuhan penduduk juga dapat menyebabkan kemiskinan dimana dengan meningkatnya jumlah penduduk membuat jumlah penduduk tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan. Sehingga masyarakat memilih bekerja seimbang dengan lapangan pekerjaan. Sehingga masyarakat memilih bekerja dengan upah minimum daripada tidak bekerja sama sedengan upah minimum daripada tidak bekerja sama sekali. Upah minimum kali. Upah minimum yang didapatkan tidak sepadan dengan beban yang ditanggung oleh individu yang didapatkan tidak sepadan dengan beban yang ditanggung oleh individu tersebut. Sehingga, apabila jumlah penduduk makin meningkat maka akan tersebut. Sehingga, apabila jumlah penduduk makin meningkat maka akan menghasilkan lebih banyak pengangguran dan kesenjangan di masyarakat.menghasilkan lebih banyak pengangguran dan kesenjangan di masyarakat.
- 4) Keterbatasan akses terhadap keterbatasan akses terhadap sistem sumber merupakan penyebab lain dari dap sistem sumber merupakan penyebab lain dari kemiskinan. Dengan kurangnya akses terhadap sistem sumber,

maka kemiskinan. Dengan kurangnya akses terhadap sistem sumber, maka masyarakat tidak akan mampu memanfaatkan sumber dengan baik untuk masyarakat tidak akan mampu memanfaatkan sumber dengan baik untuk kehidupan mereka sehingga dapat menyebabkan kemiskinan. kehidupan mereka sehingga dapat menyebabkan kemiskinan.

2.2.3 Tinjauan Tentang Perlindungan Sosial

1. Definisi Perlindungan Sosial

Sampai saat ini, terdapat berbagai definisi tentang perlindungan sosial dan keamanan sosial. Keberagaman ini dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Asian Development Bank (ADB) menjelaskan bahwa perlindungan sosial pada dasarnya yaitu

“Seperangkat kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk untuk melindungi diri dari bencana dan kehilangan pendapatan”

Tidak berarti bahwa perlindungan sosial adalah keseluruhan dari kegiatan pembangunan di bidang sosial, bahkan perlindungan sosial tidak termasuk upaya pengurangan risiko. Oleh karena itu, dijelaskan juga bahwa istilah jaring pengaman sosial dan jaminan sosial sering digunakan sebagai alternatif dari istilah perlindungan sosial, tetapi istilah yang lebih sering digunakan di dunia internasional adalah perlindungan sosial. Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tertulis bahwa “Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial”

Sedangkan menurut Edi Suharto dalam bahwa:

“Perlindungan sosial adalah seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui perluasan pasar kerja yang efisien, mengurangi risiko kehidupan yang selalu mengancam manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi diri dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya atau hilangnya pendapatan”.

Menurut *Asian Development Bank* (ADB) kebijakan dan program perlindungan sosial, khususnya dalam rangka negara-negara di kawasan ASEAN, mencakup lima elemen, yaitu sebagai berikut.

- 1) Kebijakan pasar tenaga kerja yang dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan dan mempromosikan operasi hukum penawaran dan permintaan kerja secara efisien.
- 2) Bantuan sosial yaitu program jaminan sosial berupa tunjangan uang, barang, atau jasa kesejahteraan umumnya diberikan kepada populasi yang paling rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.
- 3) Asuransi sosial yaitu skema jaminan sosial yang hanya diberikan kepada peserta sesuai dengan kontribusinya berupa iuran atau tabungan yang dibayar.
- 4) Jaring pengaman sosial berbasis masyarakat, perlindungan sosial ini diarahkan untuk mengatasi kerentanan dalam tingkat komunitas.
- 5) Perlindungan anak

2. Manfaat Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial dimaksudkan sebagai cara untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat yang hidup sangat miskin. Beberapa manfaat perlindungan sosial antara lain sebagai berikut:

- 1) Melindungi manusia dari berbagai resiko agar terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan.
- 2) Meningkatkan kemampuan kelompok rentan dalam menghadapi kemiskinan dan keluar dari kemiskinan absolute.
- 3) Keluarga miskin memiliki standar hidup yang bermartabat
- 4) Tercapainya dan terselenggaranya kesejahteraan sosial.

2.2.4 Tinjauan Tentang Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program perlindungan sosial yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan dimana mereka terdaftar di Data Terpatu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH termasuk kedalam salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi yang dialami oleh masyarakat miskin dan rentan. Sebagai suatu program bantuan sosial bersyarat, PKH bertujuan untuk membuka akses keluarga penerima manfaat bagi ibu hamil dan anak usia dini untuk memanfaatkan fasilitas/layanan kesehatan dan anak usia sekolah dalam memanfaatkan fasilitas/layanan Pendidikan yang tersedia di wilayah terdekat.

Selain itu, PKH juga mencakup kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Selain di dorong untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial, KPM PKH juga

didampingi untuk mendapatkan perlindungan sosial secara berkelanjutan. PKH sendiri dibentuk di 7 Provinsi, namun seiring berjalannya waktu hingga saat ini PKH telah dilaksanakan di 34 Provinsi mencakup 514 Kabupaten/Kota dan 6.709 Kecamatan.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun Tujuan dari Program Keluarga Harapan yang tertulis di dalam Pedoman PKH (2021) adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat dengan mengakses layanan Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan membangun kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan Pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- 4) Menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.
- 5) Mengenalkan manfaat dari produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

3. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

1) Hak Keluarga penerima Manfaat PKH

- (1) Mendapatkan bantuan sosial PKH
- (2) Pendampingan sosial PKH
- (3) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial
- (4) Program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2) Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

- (1) Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib untuk memeriksakan kesehatannya pada fasilitas/layanan kesehatan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib untuk mengikuti kegiatan belajar dengan presentasi efektifitas kehadiran minimal 85% .
- (3) Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia dan penyandang disabilitas berat, wajib untuk mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan paling sedikit setahun sekali.
- (4) Keluarga Penerima Manfaat wajib hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan KelPertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang diadakan setiap uarga (P2K2) yang diadakan setiap bulan.bulan.
- (5) Seluruh KPM harus memenuhi kewajibannya, kecuali jika terjadi keadaan yang tidak dapat diantisipasi/diluar kendali.yang tidak dapat diantisipasi/diluar kendali.
- (6) KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi yang akan ditetapkan lebih lanjut sesuaiditetapkan lebih lanjut sesuai dengan petunjuk pelaksanaan verifikasi dengan petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen.

4. Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Adapun kriteria penerima manfaat Program keluarga Harapan yang ditulis dalam Pedoman PKH 2021 adalah sebagai berikut :

1) Komponen Kesehatan

- (1) Ibu Hamil/nifas/menyusui mendapatkan bantuan sebesar Rp 2.400.000
- (2) Anak usia dini 0 6 tahun yang belum bersekolah mendapatkan bantuan sebesar Rp 2.400.000

2) Komponen Pendidikan

- (1) Siswa/i Sekolah Dasar memperoleh bantuan sebesar Rp 900.000
- (2) Siswa/i Sekolah Menengah P ertama memperoleh bantuan sebesar Rp 1.500.000
- (3) Siswa/i Sekolah Menengah Atas memperoleh bantuan sebesar Rp 2.000.000

3) Komponen Kesejahteraan Sosial

- (1) Disabilitas berat yang sudah tidak mampu melakukan kegiatan sehari hari mendapatkan bantuan sebesar Rp 2.400 .000
- (2) Lanjut usia mendapatkan bantuan sebesar Rp 2.400.000 Bantuan untuk setiap komponen yang diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu Kartu Keluarga. Apabila komponen dalam satu Kartu Keluarga melebihi 4 jiwa, maka merujuk kepada batasan bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial.

5. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga

P2K2 atau yang sering disebut FDS (*Family Development Session*) merupakan salah satu Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk mempercepat perubahan perilaku kepada penerima manfaat PKH. Secara umum P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman

mengenai pentingnya pengasuhan dan Pendidikan anak, Kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga, sehingga mendorong terciptanya percepatan perubahan perilaku (Pedoman Pelaksanaan PKH, 2021 : 36). Pelaksanaan P2K2 ini merupakan kegiatan rutin bulanan yang dilaksanakan oleh pendamping PKH. Adapun Modul FDS (*Family Development Session*) antara lain, Modul Perlindungan Anak, Modul Pengasuhan dan Pendidikan Anak, Modul Kesehatan dan Gizi, Modul Kesejahteraan Sosial, Modul Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha. Kegiatan FDS (*Family Development Session*) ini difasilitasi oleh Pendamping Sosial PKH yang sudah mengikuti kegiatan diklat FDS (*Family Development Session*) serta dinyatakan lulus oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kementerian Sosial RI.

2.2.5 Tinjauan Tentang Pendamping Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39/2012 dan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 16/2017, pendamping sosial adalah SDM kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat yang terbagi dalam 14 nomenklatur. Berdasarkan Buku Pedoman Program Keluarga Harapan, tugas dan kewajiban seorang pendamping sosial diantaranya adalah

1. Tugas Pendamping Sosial PKH, meliputi :
 - 1) Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, organisasi perangkat daerah, dan masyarakat umum;

- 2) Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon KPM PKH;
 - 3) Melakukan verifikasi komitmen kehadiran anggota KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) Melakukan pendampingan KPM PKH dalam fasilitasi akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban sesuai ketentuan;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap terjadi perubahan;
 - 6) Melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) bagi seluruh KPM PKH sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
 - 7) Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementer lainnya.
2. Kewajiban Pendamping Sosial PKH, meliputi :
- 1) Membuat rencana kerja implementasi PKH di tingkat kecamatan dan disampaikan kepada Koordinator Kabupaten/Kota dan Pekerja Sosial Supervisor;
 - 2) Memfasilitasi pemecahan isu, penanganan keluhan dan kasus yang berasal dari KPM PKH;
 - 3) Menyediakan informasi terkait PKH berdasarkan permintaan dari Koordinator Kabupaten/Kota dan Pekerja Sosial Supervisor, Koordinator Wilayah, Koordinator Regional, dan/atau Direktorat JSK melalui SimPKH atau media komunikasi lainnya;

- 4) Memastikan KPM PKH memperoleh penyaluran bantuan PKH dan program komplementer lainnya;
- 5) Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau pemantapan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial maupun oleh Dinas/Instansi Sosial Pelaksana PKH;
- 6) Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan program sesuai Pedoman Operasional PKH dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial;
- 7) Bertanggung jawab dan melaporkan realisasi pelaksanaan PKH kepada Koordinator Kabupaten/Kota dan Pekerja Sosial Supervisor.

2.2.6 Tinjauan Tentang Pekerja Sosial dengan Kemiskinan

1. Pengertian Pekerja Sosial dan kemiskinan

Pekerja Sosial sebagai profesi utama dalam usaha kesejahteraan sosial memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tugas dan tanggung jawab pekerjaan sosial adalah memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan masyarakat miskin, agar mereka dapat berfungsi atau dapat menjalankan tugas-tugas kehidupannya dengan baik, yakni tugas dalam memenuhi kebutuhannya. (Abu Huraerah,2011)

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Profesi pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan

pembebasan manusia, serta perbaikan masyarakat. Menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik (atau situasi) dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial (Suharto, 2014:123&125).

2. Tujuan Pekerja Sosial

Tujuan dari pekerja sosial seperti yang telah dirumuskan oleh (Pincus dan Minahan, 1973:9) dalam buku *Social Work Practice* yang menyatakan tujuan dari pekerja sosial adalah:

- 1) *Enhance the problem solving and coping capacities of people* (Mempertinggi kemampuan orang untuk memecahkan masalah dan menanggulangi masalahnya)
- 2) *Link people with system that provide them with resources, service, and opportunities* (Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang menyediakan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan).
- 3) *Promote the effective and human operation of these systems* (Meningkatkan pelaksanaan sistem-sistem tersebut secara efektif dan manusiawi).
- 4) *Contribute to the development and operation of these systems* (Memberikan sumbangan terhadap pembangunan dan kemajuan kebijakan sosial).

Secara keseluruhan tujuan dari pekerjaan sosial adalah membantu memberikan pelayanan-pelayanan sosial kepada individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat yang mengalami hambatan sosial/keberfungsian sosial yang tidak

berjalan dengan seharusnya, mengoptimalkan kemampuan klien dalam menjalankan peran-peran kehidupan, mencari alternatif-alternatif untuk pemecahan masalah, mendekati klien dengan sistem-sistem sumber, melakukan perubahan-perubahan kondisi di lingkungan/interaksi sosial dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan sosial yang tidak dipergunakan dalam makro. Keseluruhan dari hal-hal tersebut harus mampu diperankan oleh seorang pekerja sosial.

3. Pekerja Sosial Komunitas dalam Penanganan Kemiskinan

“Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat (PPM) atau *Community Organization Or Community Development (COCD)* adalah proses perencanaan, pengorganisasian, atau program kemasyarakatan dengan tujuan utama meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat. . Metode tersebut dapat memberikan sumbanganyang berarti bagi penanggulangan kemiskinan. Ini adalah kegiatan kolaboratif yang melibatkan banyak pihak yang terlibat.” Menurut Arthur Dunham (1958) mengungkapkan bahwa *Community Organization* adalah Pengorganisasian merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan sosial dan sumber-sumber kesejahteraan sosial dalam suatu masyarakat atau bidang kegiatan tertentu. Terdapat juga strategi dan taktik dalam praktik pekerjaan sosial, yakni Kolaborasi dan Kampanye (Netting, 2004:250) adalah :

1. Kerjasama (*Collaboration*)

Kerjasama atau kolaborasi adalah strategi pengembangan masyarakat yang dilakukan ketika masyarakat telah memiliki pemahaman tentang tindakan

yang harus diambil. Masyarakat telah memiliki kesadaran, kemauan, atau kesepakatan bersama untuk melaksanakan suatu kegiatan atau menciptakan hubungan antara sistem sasaran dan sistem pelaksana perubahan. Kedua sistem tersebut saling setuju untuk melakukan perubahan. Taktik yang digunakan yaitu :

- 1) Implementasi, yaitu kerjasama yang erat antara sistem kegiatan dan sistem sasaran sehingga rencana perubahan dapat diimplementasikan.
- 2) *Capacity Building*, yaitu pengembangan kemampuan yang dapat dilakukan dengan perluasan partisipasi mengacu pada kegiatan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemberdayaan merupakan proses menolong kelompok masyarakat sehingga mampu untuk berdaya.

2. Kampanye Sosial (*Social Campaign*)

Kampanye sosial merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi anggota sistem sasaran atau masyarakat agar dapat memahami dan menyadari bahwa perubahan benar-benar dibutuhkan. Taktik yang digunakan yaitu :

- 1) Pendidikan atau Penyuluhan Sosial bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka mampu menerima apa yang akan dilakukan dan bersedia untuk terlibat secara aktif.
- 2) Teknik persuasi, dilakukan berupa seni untuk membujuk, meyakinkan dan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan suatu kegiatan yang bermanfaat.

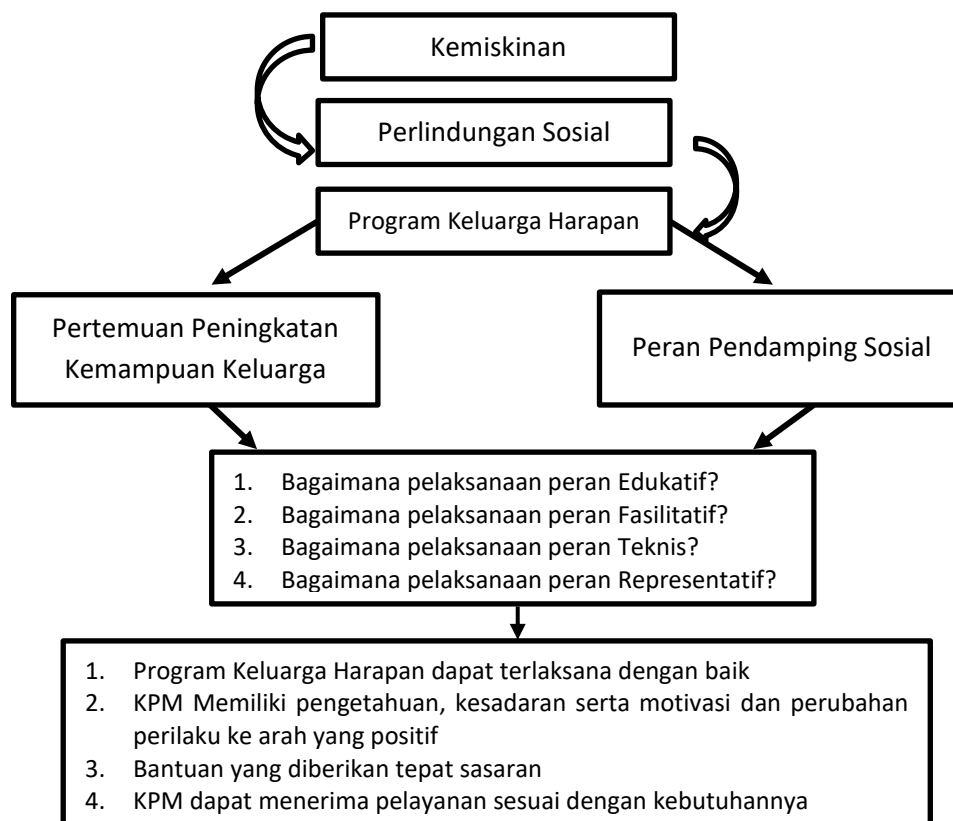
3. *Fokus Group Discussion* (FGD)

Secara sederhana, teknik "*Fokus Group Discussion* (FGD) adalah sebuah metode diskusi terstruktur dan terarah mengenai isu atau masalah tertentu.

Menurut Irwanto (2006:1-2), FGD merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi secara sistematis tentang permasalahan yang sangat spesifik melalui diskusi dalam kelompok.”

2.3 Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011:60) mengemukakan bahwa Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tinjauan pustaka yang telah penelitian uraikan di BAB sebelumnya, untuk memperjelas kembali peneliti menuangkan dalam skema kerangka berpikir sebagaimana terlihat sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

Berdasarkan Gambar 2.1 tersebut dapat dilihat bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan berbagai usaha yang salah satunya adalah dibentuknya perlindungan sosial yang salah satu programnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Peran pendamping sosial dan Pertemuan Peningkatan kemampuan Kemampuan Keeluarga sangat penting dalam program keluarga harapan karena program tersebut tidak hanya berupa antuan tetapi juga diharapkan dapat merubah serta meningkatkan pola pikir penerima bantuan (KPM) agar memiliki pengetahuan , kesadaran serta motivasi untuk mandiri.